

Evaluasi Komunikasi Publik Dalam Dakwah Pembangunan Analisis Retorika Pernyataan Bupati Sumenep Tentang Kemiskinan Petani Di Media Online

Widadi Amado dan Abdullah Sattar

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: widadiamado247@gmail.com dan martabakbangsattar@uinsa.ac.id

This study aims to evaluate regional public communication through Aristoteles rhetorical framework by analyzing the statement of the Regent of Sumenep regarding the potential emergence of new poverty among farmers, as reported by Kompas.com. Using a qualitative content analysis method, the research examines three rhetorical components ethos, pathos, and logos to assess the effectiveness of the regent's message in the and public responses in online comment sections. The findings indicate that the regent's rhetoric is imbalanced. His positional ethos as a regional leader is not supported by substantive ethos that reflect moral closeness and empathy toward farmers, resulting in public resistance. The emotional appeal pathos expressed through warnings and expressions of concern triggered negative public emotions due to the absence of concrete solutions. Meanwhile, the logical structure logos appears weak because it relies on partial data and predictive reasoning that lacks comprehensive empirical support. This imbalance contributes to public criticism, decreasing trust, and the failure to build and inclusive development narrative. From the perspective of development focused Islamic communication (dakwah pembangunan), the findings underscore the importance of humanistic, data-driven, and empowerment oriented communication by public officials. Future studies are recommended to conduct comparative rhetorical analyses, integrate media framing examinations, and explore the perspective of farmers as directly affected stakeholders.

Keywords: Public Communication, Aristotelian Rhetoric, Sumenep Regent, Development Da'wa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi komunikasi publik pejabat daerah melalui analisis retorika Aristoteles terhadap pernyataan Bupati Sumenep mengenai potensi kemiskinan petani sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com. Peneliti ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan fokus pada tiga unsur retorika: *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Data diambil dari teks berita serta respons publik dalam komentar media online untuk menilai efektivitas retorika dalam ruang komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retorika Bupati bersifat tidak seimbang. *Ethos* posisional sebagai kepala daerah tidak diikuti oleh *ethos* substansif yang mencerminkan kedekatan moral dan kepedulian terhadap petani, sehingga memunculkan resistensi publik. Unsur *pathos* yang digunakan melalui diksi peringatan dan kekhawatiran justru menimbulkan emosi negatif karena tidak dibarengi solusi konkret. Sementara itu, *logos* terlihat lemah akibat penggunaan data parsial dan argumentasi prediktif yang tidak didukung bukti empiris yang komprehensif. Ketidakefektifan retorika ini berdampak pada munculnya kritik publik, melemahnya kepercayaan masyarakat, dan gagalnya pembentukan narasi pembangunan yang inklusif. Dalam perspektif dakwah pembangunan, temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi pejabat yang humanis, berbasis data, dan

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan yang melibatkan analisis perbandingan, pembacaan framing media, serta pendalaman perspektif kelompok petani sebagai pihak terdampak.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Retorika Aristoteles, Bupati Sumenep, Dakwah Pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Isu kemiskinan petani di wilayah pedesaan Indonesia tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga struktur sosial yang kompleks. Banyak petani masih hidup dalam kondisi rentan dikarenakan keterbatasan akses sumber daya, penguasaan lahan yang timpang, dan dominasi rantai pasar yang lemah, sehingga mereka kesulitan meningkatkan taraf hidupnya.¹ Kondisi ini diperparah oleh minimnya dukungan kelembagaan serta kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Sebagai entitas pemerintah lokal, pejabat daerah seperti bupati menjadi sangat krusial dalam menyampaikan pesan publik yang menyangkut kesejahteraan petani. Komunikasi mereka tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal legitimasi dan narasi pembangunan.

Dalam konteks tersebut, komunikasi publik merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika pejabat daerah menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana dakwah pembangunan yang menggerakkan partisipasi, membangun kesadaran, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Effendy bahwa komunikasi pembangunan berperan sebagai proses penyampaian pesan untuk memengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat menuju kondisi lebih baik.²

Teori Aristoteles sangat relevan untuk menilai kualitas persuasie dalam pesan pejabat publik. Menurut Aisyah, unsur *ethos* mencerminkan kredibilitas dan karakter moral pembicara, *pathos* berfungsi dalam menimbulkan resonansi emosional audiens, dan *logos* menegaskan argumen logis dan rasional dalam

¹ Tri Putra Kurnia Seba, Melsje Yellie Memah, And Noortje Marsellanie Benu, "Ketimpangan Sosial Pada Sumberdaya Pertanian Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa," *Journal Of Agribusiness And Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)* 6, No. 4 (2024): 251–58.

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Ed. Tjun Surjaman, 29th Ed. (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2019).

wacana publik.³ Pendekatan ini juga telah diterapkan dalam konteks politik; dalam penelitian Adam Isa yang berjudul Retorika Prabowo Subianto dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto berhasil memanfaatkan ketiga elemen retorika Aristoteles yaitu *ethos*, *pathos*, dan *logos* untuk meningkatkan kredibilitas, membangun koneksi emosional, dan menyampaikan argumen yang logis.⁴

Analisis retorika menjadi penting ketika pejabat daerah berbicara tentang kemiskinan petani. Jika pejabat menyampaikan pernyataan tanpa memperhatikan *ethos*, masyarakat bisa mempertanyakan kredibilitasnya dan menilai bahwa ia tidak benar-benar memahami kondisi petani. Jika *pathos* tidak dikelola dengan baik, pernyataan tersebut bisa menyinggung emosi petani dan publik, alih-alih membangkitkan empati atau simpati. Sedangkan jika *logos* lemah, misalnya argumen yang disampaikan tidak didukung data atau analisis, maka pesan pembangunan bisa dianggap dangkal dan tidak realistis.

Lebih jauh, pendekatan retorika dalam komunikasi publik pejabat daerah juga berkaitan dengan konsep dakwah pembangunan, dimana pejabat tidak hanya berbicara sebagai teknokrat, tetapi juga sebagai pemberi harapan dan pemimpin moral.⁵ Komunikasi pembangunan yang efektif harus mampu menyatukan dimensi moral, rasional, dan emosional agar pesan kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai pemersatu dan motivator perubahan sosial. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu membangun pola komunikasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif agar petani miskin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.⁶

³ Meidy Aisyah, "Ethos, Pathos, Logos Dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review," *Jurnal Dharma Agung* 30, No. 3 (November 14, 2022): 459, <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i3.2066>.

⁴ Adam Isa, "Retorika Prabowo Subianto Dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024," *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 16, No. 2 (September 5, 2024): 143–67, <https://doi.org/10.23917/Komuniti.V16i2.5492>.

⁵ Aisyah, "Ethos, Pathos, Logos Dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review."

⁶ Arif Widodo, Febriany, Irfaturahmah, "Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah," *Selasar Kpi: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.33507/Selasar.V1i1.312>.

Selain itu, metode analisis konten atau analisis teks menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan penilaian retorika pesan pejabat tanpa intervensi langsung. Eriyanto, menyatakan analisis isi adalah metode efektif untuk mengurai struktur wacana media dan pesan publik, termasuk retorika politik pejabat.⁷ Karenanya, penelitian retorika terhadap pernyataan Bupati Sumenep di media online tidak hanya mengungkap gaya persuasi, tetapi juga dampak simbolis dan komunikatif dari pesan pembangunan yang disampaikan.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini berupaya mengevaluasi komunikasi publik pejabat daerah melalui analisis retorika Aristoteles untuk memahami sejauh mana pesan Bupati Sumenep tentang kemiskinan petani mampu membangun kredibilitas, menyentuh emosi publik, dan menyampaikan argumen logis dalam bingkai pembangunan sosial-ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna yang terkandung dalam pernyataan Bupati Sumenep mengenai kemiskinan petani sebagaimana diberitakan oleh media online. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang luas untuk menafsirkan konteks, struktur wacana, serta pesan komunikatif yang muncul dalam teks. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap kata, kalimat, atau simbol, sehingga relevan untuk mengkaji retorika komunikasi publik.⁸

Jenis penelitian ini adalah isi kualitatif, yakni bentuk analisis yang menekankan penafsiran makna berdasarkan kategori konseptual tertentu. Schreier menyatakan bahwa analisis isi kualitatif bertujuan mengidentifikasi pola dan struktur dalam pesan media sesuai kerangka teori yang ditetapkan.⁹ Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah teori Retorika Aristoteles, yang

⁷ Eric Persadanta Bangun, Ferry V I A Koagouw, And J S Kalangi, "Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline. Com," *Acta Diurna Komunikasi* 1, No. 3 (2019).

⁸ Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. 2012" (Bandung, 2018).

⁹ Moleong.

meliputi unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Ketiga unsur tersebut menjadi kategori analisis utama dalam membaca dan menafsirkan pernyataan pejabat publik.

Sumber data penelitian ini berupa teks berita media online Kompas.com yang memuat pernyataan Bupati Sumenep tentang kemiskinan petani. Media online dipilih karena memiliki karakter penyebaran pesan yang cepat dan luas, sehingga membentuk konstruksi opini publik secara signifikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Nasrullah, yang menegaskan bahwa ruang digital merupakan arena baru pembentukan wacana dan persepsi sosial.¹⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan teks berita serta melakukan pelacakan arsip untuk memastikan keakuratan konteks. Dokumentasi dinilai efektif sebagai teknik memperoleh data tekstual yang autentik dalam penelitian kualitatif.¹¹

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian pernyataan yang relevan dengan isu kemiskinan petani. selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos* untuk mengidentifikasi struktur retorika yang digunakan. Tahap terakhir adalah interpretasi dalam perspektif dakwah pembangunan dengan melihat sejauh mana pesan tersebut mencerminkan etika komunikasi, keberpihakan pada masyarakat rentan, serta menilai kemaslahatan publik. Teknik analisis ini sejalan dengan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yang menekankan siklus reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berulang sampai diperoleh pemahaman yang komprehensif.¹²

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dan pembacaan berulang. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tidak terjadi distorsi konteks. Menurut Moleong, triangulasi merupakan strategi penting dalam menjamin kredibilitas data kualitatif.¹³ Pembacaan berulang juga dilakukan untuk

¹⁰ Moleong.

¹¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D," *Alfabeta, Bandung*, 2016.

¹² Sugiyono.

¹³ Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. 2012."

mempertajam interpretasi dan menjaga konsistensi analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Pernyataan Bupati

a. Kutipan Asli dari Berita

Pernyataan Bupati Sumenep yaitu Achmad Fauzi Wongsojudo, mengenai isu kemiskinan petani diperoleh dari pemberitaan Kompas.com dengan judul “Petani Jadi Penyumbang Angka Kemiskinan di Sumenep” (13 Agustus 2025). Dalam berita tersebut, Bupati menyampaikan bahwa petani merupakan salah satu kelompok yang rentan menyumbang angka kemiskinan daerah. Pernyataan tersebut dinyatakan secara eksplisit melalui kutipan berikut:

“Petani menjadi salah satu kelompok yang menyumbang angka kemiskinan.”¹⁴

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan kerugian bagi petani dan berpotensi memunculkan kemiskinan baru di pedesaan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Begini, pada saat cuaca ini tidak menentu, maka kami khawatirkan petani ini mengeluarkan modal, bertani, rugi. Yang kami khawatirkan begitu merugi, ini kan bisa saja muncul orang miskin baru.”¹⁵

Bupati juga menekankan situasi ketika petani menghabiskan tabungan mereka untuk modal bertani, sehingga apabila panen gagal, kerentanan ekonomi meningkat:

“Pada saat misalnya, uan saving yang dia punya, dia habiskan untuk bertani dan sebagainya, tiba-tiba panennya gagal, ini yang kami khawatirkan dari awal.”¹⁶

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau agar petani menunggu arahan sebelum menanam tembakau:

¹⁴ Nur Khalis, Icha Rastika, “Petani Jadi Penyumbang Angka Kemiskinan,” Kompas.com, accessed November 23, 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/13/145512778/petani-jadi-penyumbang-angka-kemiskinan-di-sumenep>.

¹⁵ Nur Khalis.

¹⁶ Nur Khalis.

“Makanya, kita wanti-wanti agar mereka tidak tanam sebelum kami kasih kode. Tapi petani kan punya keyakinan sendiri.”¹⁷

Bupati juga mengutip data dari Dinas Pertanian mengenai banyaknya tanaman tembakau yang gagal tumbuh akibat cuaca:

“Tadi data dari Dinas Pertanian, hanya ada sekitar 3 ribu hektar tanaman tembakau yang hidup ya, artinya kan ada yang nggak hidup berarti.”¹⁸

Kutipan-kutipan ini menjadi dasar analisis retorika Aristoteles dalam penelitian ini, terutama terkait *ethos* (otoritas pemerintah), *pathos* (ketakutan akan kemiskinan baru), dan *logos* (data faktual pertanian).

b. Konteks Pemberitaan

Pernyataan Bupati tersebut disampaikan pada acara rapat penetapan titik impas harga tembakau yang berlangsung di Aula Wiraraja, lantai dua Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait sektor pertanian dan pertembakauan. Kompas.com menempatkan pernyataan ini dalam konteks:

1. Resiko ketidakpastian cuaca, yang dapat menyebabkan kegagalan produksi tembakau.
2. Kerentanan ekonomi petani, karena modal bercocok tanam berasal dari tabungan atau pinjaman pribadi.
3. Potensi munculnya “orang miskin baru,” apabila kerugian terjadi secara masif.
4. Upaya pemerintah mengatur pola tanam, meskipun beberapa petani tetap mengikuti intuisi dan pengalaman mereka.

Dalam pemberitaan tersebut, tembakau diposisikan sebagai komoditas unggulan Sumenep, tetapi tidak masuk dalam indikator pendapatan masyarakat versi Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menyebabkan keberhasilan budidaya tembakau tidak otomatis berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

¹⁷ Nur Khalis.

¹⁸ Nur Khalis.

Konteks ini memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha merumuskan langkah antisipatif, meskipun pernyataannya berpotensi memunculkan berbagai tafsir dari publik terkait sensitivitas pemerintah terhadap kondisi petani.

c. Reaksi Publik

Analisis reaksi publik dalam penelitian ini didasarkan pada komentar warganet yang muncul dalam media sosial dan kolom komentar pemberitaan. Dalam ruang digital, pernyataan Bupati memicu respons kritis dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dan cara penyampaian pesan publik.

Pertama, sejumlah warga menilai bahwa pemerintah justru menyalahkan petani atas tingginya angka kemiskinan. Hal ini tampak dari komentar berikut:

*“Keahlian pemerintah tidak bikin rakyat sejahtera, tapi nyalahin rakyat.”*¹⁹

Komentar tersebut menunjukkan resistensi publik terhadap narasi pejabat yang dianggap kurang berpihak pada kelompok rentan.

Kedua, publik mengkritisi imbauan Bupati agar petani menunggu “kode” dari pemerintah sebelum menanam. Komentar berikut menegaskan bahwa imbauan tersebut dinilai tidak realistis bagi petani yang bergantung pada penghasilan harian:

“Selama nunggu kode, makan apa petaninya pak? Saran ya pak, tolong kurangi event-event yang gak bermanfaat.” (@nuriya12_)²⁰

Ketiga, komentar yang mempersoalkan minimnya solusi konkret dari pemerintah. Publik menuntut agar pemerintah menyediakan fasilitas pendukung seperti pupuk, bibit, dan peralatan pertanian, bukan hanya peringatan atau imbauan:

¹⁹ Repetisi, “Pernyataan Bupati Sumenep Soal Petani Penyumbang Angka Kemiskinan Picu Gelombang Kritik Di Media Sosial,” Repetisi Merekam Peristiwa, Menyuarakan Kebeneran, accessed November 23, 2025, <https://www.repetisi.net/2025/09/pernyataan-bupati-sumenep-soal-petani-penyumbang-angka-kemiskinan.html>.

²⁰ Repetisi.

“Sediakan pupuk dan bibit yang berkualitas, yang murah mudah dijangkau petani saja. Kasi petani solusi bukan cuma kode-kode.”
(@nurulhasanahhansari)²¹

Komentar-komentar ini memperlihatkan bahwa pernyataan Bupati tidak sepenuhnya berhasil membangun penerimaan positif di ruang publik. Respon publik menunjukkan adanya persepsi bahwa retorika pemerintah belum memadai dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi petani

2. Analisis *Ethos*

a. Kredibilitas Bupati (*Ethos* Posisional dan Personal)

Secara posisional, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memiliki *ethos* formal sebagai kepala daerah yang secara struktural memegang otoritas dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk sektor pertanian. *Ethos posisional* ini memberikan legitimasi institusional terhadap pernyataan yang disampaikan.²²

Namun, *ethos personal* yakni persepsi publik terhadap kompetensi, kepedulian, dan integritasnya terlihat mengalami tantangan. Dalam kutipan dari pemberitaan, Fauzi menekankan kekhawatiran mengenai potensi munculnya “*orang miskin baru*” akibat kerugian petani di tengah cuaca ekstrem. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia memahami resiko ekonomi berbasis kondisi alam dan modal petani, sehingga memperlihatkan kapasitas analitis yang relevan dengan isu kemiskinan.

Akan tetapi, kredibilitas personal ini bertemu resistensi publik akibat adanya persepsi bahwa pemerintah kurang menyajikan solusi konkret bagi petani. Komentar-komentar publik seperti “*keahlian pemerintah tidak bikin rakyat sejahtera, tapi nyalahin rakyat*” menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.

Menurut Aristoteles, *ethos* tidak hanya melekat karena jabatan, tetapi diukur melalui *phronesis* (kebijaksanaan), *arete* (keutamaan moral), dan *eunoia* (kepedulian terhadap audiens).²³ Dalam konteks ini, Fauzi berhasil menampilkan

²¹ Repetisi.

²² James C McCroskey, *An Introduction to Rhetorical Communication* (Routledge, 2015).

²³ George A Kennedy, “On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse,” 1991.

phronesis melalui analisis resiko pertanian, namun *eunoia*-nya dipertanyakan oleh publik yang menganggap pemerintah kurang memahami kebutuhan dasar petani seperti bibit, pupuk, dan kepastian kebijakan

b. Otoritas dan Karakter Moral yang Muncul

Pernyataan Bupati yang menyarankan agar petani “menunggu kode” dari pemerintah sebelum menanam tembakau menandakan pendekatan *top-down* dalam relasi negara dan petani. Dari sisi retorika moral, langkah tersebut menunjukkan intensi kehati-hatian pemerintah untuk mencegah kerugian petani. Secara moral, sikap preventif ini dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Namun, karakter moral ini dipersepsikan berbeda oleh publik. Komentar seperti “*Selama nunggu kode, makan apa petaninya pak?*” dan “*Kasi petani solusi bukan Cuma kode-kode.*” Menunjukkan bahwa publik menafsirkan pernyataan Bupati bukan sebagai upaya proteksi, tetapi dengan pembatasan yang tidak disertai dukungan nyata.

Dalam kajian *ethos*, karakter moral seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui niat, tetapi melalui *perceived moral action*.²⁴ Yakni sejauh mana tindakan tersebut dirasakan memberi manfaat nyata. Ketidakhadiran solusi konkret menyebabkan *moral authority* Bupati dinilai lemah, meskipun ia memiliki *legal authority* yang kuat.

c. Pengaruhnya terhadap Penerimaan Publik

Penerimaan publik terhadap pernyataan Fauzi tampak cenderung negatif. Respons publik dalam komentar media menunjukkan adanya:

1. Krisis kepercayaan (*trust deficit*)

Publik mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar memahami tantangan hidup petani. *Ethos relational*, yaitu kredibilitas yang muncul dari hubungan antara pemimpin dan masyarakat, tampak melemah.

²⁴ Harjinder Gill et al., “Antecedents of Trust: Establishing a Boundary Condition for the Relation between Propensity to Trust and Intention to Trust,” *Journal of Business and Psychology* 19, no. 3 (2005): 287–302.

2. Persepsi *Blaming the Victim*

Meskipun Bupati tidak secara eksplisit menyalah petani, publik menafsirkan pernyataannya sebagai bentuk penyedarhanan masalah struktural. Dalam retorika publik, persepsi ini dapat menciptakan kegagalan *ethos* (*ethos failure*).²⁵

3. Keterputusan antara Narasi Pemerintah dan Pengalaman Hidup Masyarakat

Publik menyoroti lemahnya dukungan seperti ketersediaan bibit dan pupuk murah. Ketidaksinkronan ini mengganggu *alignment* antara pesan pemerintah dan kondisi riil, sehingga melemahkan *ethos practical* (praktikal *credibility*).

Artinya adalah, *ethos* Bupati sebagai pemimpin daerah berada dalam posisi ambivalen: kredibilitas strukturalnya kuat, tetapi kredibilitas moral dan relasionalnya dipertanyakan. Yang berdampak pada rendahnya penerimaan publik terhadap pernyataannya. Dalam retorika politik, kondisi ini menempatkan Bupati pada situasi yang memerlukan *rebuilding ethos*, yaitu penegasan ulang kepedulian dan pemberian solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh petani.

d. Analisis *Pathos*

Dalam model retorika Aristoteles, *pathos* merujuk pada kemampuan komunikator membangkitkan emosi audiens melalui pilihan diksi, narasi, dan framing pesan.²⁶ Pada pernyataan Bupati Sumenep mengenai potensi kemiskinan baru di kalangan petani, unsur *pathos* tampak melalui bahasa yang mengandung kekhawatiran dan sifat peringatan (*warning*), yang berfungsi membangun kesadaran emosional publik tentang resiko ekonomi akibat cuaca yang tidak menentu.

1) Diksi yang Memicu Emosi Publik

Diksi seperti “*kami khawatir*,” “*merugi*,” “*muncul orang miskin baru*,” dan “*uang saving habis*” merupakan bentuk retorika afektif yang diarahkan untuk menggugah rasa waspada dan empati publik terhadap keremttan ekonomi petani.

²⁵ Roderick P Hart, Suzanne M Daughton, and Rebecca LaVally, *Modern Rhetorical Criticism* (Routledge, 2017).

²⁶ Kennedy, “On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse.”

Pilihan kata tersebut menempatkan persoalan cuaca buruk dan gagal panen sebagai ancaman langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori komunikasi politik, diksi bernuansa emosional digunakan pejabat untuk membangun *sense of urgency* dan menegaskan kepedulian terhadap rakyat.²⁷ Namun, diksi ini perlu diimbangi dengan narasi solutif agar tidak menimbulkan kesan menyalahkan kelompok tertentu.

2) Reaksi Emosional yang Ditimbulkan

Meskipun Bupati tampaknya berupaya memunculkan empati terhadap resiko yang dihadapi petani, reaksi publik yang muncul justru berlawanan. Komentar-komentar di media sosial menunjukkan sentimen marah, kecewa dan sinis. Misalnya:

- a) Keahlian pemerintah tidak bikin rakyat sejahtera, tapi nyalahin rakyat.
- b) Selama nunggu kode, makan apa petaninya pak?
- c) Kasi petani solusi, bukan cuman kode-kode.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa publik menangkap diksi Bupati bukan sebagai wujud kepedulian emosional, tetapi sebagai bentuk kurangnya empati dan kedekatan dengan realitas petani. Triwicaksono dan Nugroho menegaskan bahwa kegagalan *pathos* sering terjadi ketika pesan pejabat tidak selaras dengan persepsi dan pengalaman hidup masyarakat.²⁸

3) Efektivitas atau Kegagalan dalam Membangun Empati Publik

Dari analisis reaksi publik, dapat disimpulkan bahwa unsur *pathos* dalam retorika Bupati tidak efektif dalam membangun empati, bahkan memunculkan resistensi hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Diksi yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi petani

²⁷ Herman Sugiono and Ilmiyatur Rosida, "Analisis Retorika Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pada Sidang Tahunan MPR/DPRD 16 Agustus 2023: Penekanan Pada Pendidikan," *Journal in Teaching and Education Area* 1, no. 3 (2024): 328–40.

²⁸ Yohanes De Britto Bimo Triwicaksono and Adi Nugroho, "Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 133–45.

Kata-kata yang menyebut petani sebagai “*penyumbang kemiskinan*” dapat dipersepsikan sebagai penyalahgunaan framing dan bertentangan dengan prinsip komunikasi publik yang humanis.²⁹

2. Ketiadaan narasi solutif yang mendukung emosi kepedulian

Publik menilai bahwa kekhawatiran Bupati tidak disertai strategi konkret untuk membantu petani, sehingga *pathos* kehilangan kekuatan persuasifnya. Fahrudin et al (2022), menyatakan bahwa *pathos* baru akan efektif apabila diikuti *actionable message* yang memberi harapan kepada masyarakat.³⁰

Artinya adalah, retorika *pathos* dalam kasus ini menunjukkan kesenjangan antara niat komunikatif pejabat dan persepsi emosional audiens, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap komunikasi resmi pemerintah daerah.

e. Analisis Logos

Dalam kerangka retorika Aristoteles, *logos* merujuk pada aspek rasional dari pesan dibangun melalui argumentasi, penalaran, dan bukti faktual.³¹ Pada pernyataan Bupati Sumemep mengenai potensi kemiskinan baru di kalangan petani, unsur *logos* muncul melalui penjelasan mengenai cuaca yang tidak menentu, resiko gagal panen, dan korelasinya dengan meningkatnya angka kemiskinan. Namun, efektivitas *logos* ini perlu dianalisis dari segi koherensi argumentasi dan kekuatan data pendukung.

1) Klaim Logis yang Disampaikan

Bupati menyampaikan beberapa klaim utama: Pertama, cuaca yang tidak menentu berpotensi membuat petani merugi. Kedua, kerugian bertani dapat membuat munculnya “orang miskin baru.” Ketiga, gagal panen terjadi karena

²⁹ Johantan Alfando Wikandana Sucipta, “Retorika Politik Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor Dalam Menghadapi Media Massa,” *Literasi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023).

³⁰ Atef Fahrudin, Diding Bajuri, and Syamsul Arif Billah, “Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Kanal Youtube Official INews,” *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 5, no. 2 (2022): 200–215.

³¹ Kennedy, “On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse.”

banyaknya tanaman tembakau yang tidak tumbuh baik. Keempat, petani perlu menunggu arahan pemerintah agar tidak salah waktu menanam.

Klaim tersebut secara logis berusaha menghubungkan variabel “cuaca buruk,” “modal bertani,” dan “resiko kemiskinan.” Dalam perspektif komunikasi publik, bentuk argumentasi seperti ini disebut *causal reasoning*, yakni penalaran yang menjelaskan hubungan sebab-akibat.³²

2) Ketepatan Argumentasi

Jika dilihat secara konseptual, argumen Bupati tampak memiliki landasan ekonomi dasar: “gagal panen,” “kehilangan modal,” “penurunan pendapatan,” dan “potensi kemiskinan.” Pola hubungan tersebut selaras dengan karakter ekonomi petani yang sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga ketidakpastian cuaca dengan sendirinya memperbesar kerentanan mereka.

Namun karena ketepatan argumentasi Bupati masih perlu dipertanyakan karena: Pertama, ia tidak menyertakan data spesifik tentang berapa jumlah petani yang mengalami kerugian, tingkat penurunan pendapatan, atau estimasi dampak ekonominya. Kedua, argumen sebab-akibat yang disampaikan bersifat prediktif dan bukan berbasis data empiris mutakhir. Ketiga, narasi yang dibangun lebih menekankan ancaman tanpa menyertakan analisis struktural yang memadai mengenai faktor kemiskinan petani, seperti akses pasar, harga jual, atau infrastruktur pertanian.

Dalam retorika Aristoteles, ketepatan *logos* mengharuskan argumen didukung oleh fakta kuat dan koherensi penalaran yang tidak meninggalkan *logical gaps*.³³ Pada sub-bab ini, argumentasi Bupati masih memiliki ruang kelemahan.

³² Sucipta, “Retorika Politik Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor Dalam Menghadapi Media Massa.”

³³ Sugiono and Rosida, “Analisis Retorika Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pada Sidang Tahunan MPR/DPRD 16 Agustus 2023: Penekanan Pada Pendidikan.”

3) Kelemahan Data atau *Reasoning*

Beberapa kelemahan *logos* dalam pernyataan Bupati dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Data yang digunakan bersifat parsial dan tidak konklusif

Bupati menyebut angka “3000 hektar tanaman tembakau yang tumbuh baik,” namun tidak memberikan total ulasan lahan keseluruhan, persentase kegagalan panen secara rinci, dan pengaruh langsung luasan gagal panen terhadap tingkat kemiskinan.

Kelemahan ini membuat argumen menjadi *insufficiently grounded*, sebagaimana dikatakan oleh Fahrudin bahwa retorika pejabat publik sering melemah ketika data disampaikan secara parsial tanpa indikator pendukung.³⁴

2. Generalisasi berlebihan terhadap petani sebagai penyumbang kemiskinan

Pernyataan bahwa “petani menjadi penyumbang kemiskinan” tidak didasarkan pada data BPS secara spesifik dalam berita. Tanpa rujukan angka resmi, klaim ini rentan dianggap sebagai generalisasi atau *hasty conclusion*.

3. Reasoning tidak menyentuh faktor struktural kemiskinan

Argumen Bupati hanya berfokus pada cuaca sebagai penyebab kemiskina, padahal berbagai penelitian menunjukkan kemiskinan petani dipengaruhi faktor lain seperti aspek modal, harga jual, struktur pasar, dan kebijakan pemerintah.³⁵ Dengan demikian, *reasoning* Bupati dinilai kurang komprehensif.

4. Arahan “menunggu kode dari pemerintah” tidak dijelaskan secara rasional

Tidak ada penjelasan logis: apa indikator untuk memberikan “kode tanam,” apa dasar ilmiah yang digunakan pemerintah, serta bagaimana

³⁴ Fahrudin, Bajuri, and Billah, “Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Kanal Youtube Official INews.”

³⁵ Triwicaksono and Nugroho, “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah.”

mekanisme mitigasi resiko yang ditawarkan. Akibatnya, *reasoning* yang disampaikan tidak hanya lemah, tetapi juga menimbulkan resistensi publik.

Oleh sebab itu, Bupati memang berupaya menyampaikan argumen logis tentang potensi kemiskinan petani melalui kerangka sebab-akibat. Namun, kekuatan *logos* dalam pernyataannya belum optimal karena: data parsial, argumen tidak lengkap, *reasoning* tidak komprehensif, dan klaim generalisasi yang tidak disertai rujukan empiris. Kelemahan ini berdampak pada menurunnya daya persuasif pesan publik dan memperluas jarak persepsi antara pemerintah dan warga.

3. Evaluasi Efektivitas Retorika

a. Sintesis *Ethos*, *Pathos* dan *Logos*

Jika dianalisis secara komprehensif, retorika Fauzi Bupati Sumenep dalam pemberitaan Kompas.com menunjukkan ketidakseimbangan dalam penggunaan *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Dari sisi *ethos*, Bupati sebenarnya memiliki otoritas politik dan posisi formal yang kuat, sehingga secara struktural memiliki modal kredibilitas. Namun, *ethos* substansif yang ditentukan oleh persepsi publik terhadap karakter, integritas, dan kepedulian komunikator tidak terbentuk secara optimal. Hal ini terjadi karena pernyataan Bupati dipersepsikan sebagai menyalahkan petani, bukan melindungi mereka. Dalam penelitian Sucipta menegaskan kredibilitas pejabat akan melemah bila pesan publik dianggap mengandung bias atau kurang empati.

Pada aspek *pathos*, Bupati berupaya membangun emosi kewaspadaan melalui diksi seperti “khawatir,” “merugi,” dan “muncul orang miskin baru.” Namun, *pathos* ini justru menimbulkan reaksi emosional negatif berupa kekecewaan, kemarahan, dan sinisme dari masyarakat. Kegagalan *pathos* ini sejalan dengan temuan Fahrudin et al, yang menyebut bahwa retorika emosional pejabat hanya efektif apabila dipersepsikan sebagai bentuk solidaritas, bukan ancaman atau penyudutan kelompok tertentu.³⁶

Adapun dari sisi *logos*, argumentasi Bupati tidak ditopang oleh data yang lengkap dan koheren. Penjelasan sebab-akibat terkait cuaca, gagal panen, dan

³⁶ Fahrudin, Bajuri, and Billah, “Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Kanal Youtube Official INews.”

kemiskinan bersifat logis, tetapi tidak didukung bukti empiris yang kuat. Kelemahan *reasoning* ini, menurut Sugiono dan Mardiningsih, menyebabkan pesan pejabat kehilangan daya persuasi dan dinilai tidak grounded secara faktual.³⁷ Secara sintesial, retorika Bupati mengalami ketidakseimbangan retorik: *ethos* substansif lemah, *pathos* tidak efektif, dan *logos* tidak sepenuhnya valid. Ketidakseimbangan ini membuat retorika tidak bekerja secara persuasif dalam ruang publik digital.

b. Dampak terhadap Persepsi Publik dan Komunikasi Pemerintahan

Ketidakefektifan retorika ini berdampak langsung pada persepsi publik. Reaksi publik dalam komentar media sosial menunjukkan: Pertama, menurunnya kepercayaan terhadap komunikasi pemerintah. Kedua, penolakan moral terhadap framing petani sebagai penyumbang kemiskinan. Ketiga, munculnya kritik keras terkait kurangnya solusi konkret.

Dalam komunikasi pemerintahan, persepsi negatif semacam ini mengganggu fungsi komunikasi publik sebagai sarana membangun legitimasi, partisipasi, dan pemahaman bersama.³⁸ Ketika retorika pejabat dipersepsikan tidak empatik, hubungan antara pemerintah dan warga menjadi renggang, dan pesan pembangunan tidak lagi diterima secara konstruktif.

Selain itu, dalam konteks komunikasi politik lokal, kegagalan retorika pejabat dapat memicu *public backlash*, yang berpotensi merugikan stabilitas komunikasi kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya kepekaan retorika pejabat dalam isu yang menyentuh mata pencaharian masyarakat

c. Implikasi terhadap Dakwah Pembangunan

Dalam perspektif dakwah pembangunan, komunikasi pejabat tidak hanya menyampaikan informasi administratif, tetapi juga mengemban fungsi moral: membangun harapan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketika retorika pejabat gagal menciptakan empati dan rasa aman, fungsi

³⁷ Sugiono and Rosida, "Analisis Retorika Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pada Sidang Tahunan MPR/DPRD 16 Agustus 2023: Penekanan Pada Pendidikan."

³⁸ Triwicaksono and Nugroho, "Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah."

dakwah pembangunan tidak dapat berjalan optimal. Implikasi dari retorika Fauzi dalam kasus ini meliputi:

1. Gagal membangun narasi pemberdayaan

Dakwah pembangunan menekankan pemberdayaan (*empowerment*), bukan penyalahan. Narasi Fauzi tidak cukup menunjukkan komitmen pemberdayaan petani, sehingga menurunkan efektivitas dakwah pembangunan.

2. Tidak tercapainya keseimbangan *hikmah*, *mau'izhah hasanah*, dan *mujadalah* Pertama, *hikmah* (kebijaksanaan): perlu argumentasi logis yang kuat (*logos*). Kedua, *mauizhah hasanah* (nasihat yang baik): perlu empati dan kehati-hatian (*pathos*). Dan ketiga, *mujadalah* (dialog): perlu kredibilitas dan kejujuran publik (*ethos*).Ketiganya tidak tampak secara utuh dalam retorika Fauzi, sehingga komunikasi pembangunan kehilangan landasan dakwahnya.

3. Resiko hilangnya dukungan publik terhadap kebijakan pertanian

Dakwah pembangunan menuntut adanya apresiasi dan penghargaan terhadap pihak yang dilibatkan dalam pembangunan. Ketika petani sebagai pilar ekonomi daerah merasa tidak dihargai, dukungan kebijakan pemerintah dapat melemah.

Dengan demikian, retorika Fauzi menunjukkan bahwa komunikasi publik pejabat memiliki peran strategis dalam dakwah pembangunan, namun kegagalan retorika dapat menghambat misi pemberdayaan yang seharusnya dibangun

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas komunikasi publik pejabat daerah sangat ditentukan oleh keseimbangan unsur retorika Aristoteles *ethos*, *pathos*, dan *logos* dalam menyampaikan pesan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pernyataan Bupati Sumenep mengenai potensi kemiskinan petani menunjukkan adanya ketidakseimbangan retorika yang berdampak pada munculnya resistensi publik. Dari aspek *ethos*, Bupati memiliki kredibilitas struktural sebagai kepala daerah, namun *ethos* substansifnya melemah karena pernyataan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk penyederhanaan masalah dan kurang menunjukkan

empati terhadap kondisi riil petani. Pada aspek *pathos*, penggunaan diksi seperti “khawatir,” “merugi,” dan “muncul orang miskin baru” memang bertujuan membangun kesadaran atas resiko gagal panen, tetapi justru memicu emosi negatif publik karena tidak diimbangi dengan narasi solutif.

Sementara itu, *logos* dalam pernyataan tersebut tidak sepenuhnya kuat karena argumentasi yang dibangun tidak didukung oleh data empiris yang lengkap dan analisis struktural mengenai kemiskinan petani. Ketidakefektifan tiga unsur retorika ini berdampak pada melemahnya kepercayaan publik, meningkatnya kritik, dan terjadinya jarak persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pejabat tidak hanya mengandalkan otoritas jabatan, tetapi harus mampu menghadirkan rasionalitas, empati, dan moralitas secara seimbang agar pesan pembangunan diterima secara positif oleh publik. Dalam perspektif dakwah pembangunan, kegagalan retorika ini menghambat fungsi moral pemimpin dalam membangun harapan, solidaritas, dan motivasi kolektif menuju kesejahteraan.

Maka, pejabat daerah perlu membangun komunikasi yang lebih humanis, berbasis data, solutif, serta mengandung nilai dakwah yang menekankan masalah dan pemberdayaan. Adapun pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada tiga jalur: Pertama, melakukan analisis perbandingan retorika pejabat daerah lain untuk melihat pola komunikasi publik dalam isu kerentanan sosial. Kedua, mengombinasikan pendekatan retorika dengan analisis framing penerimaan publik. Ketiga, memperluas objek riset dengan memasukkan perspektif petani sebagai penerima kebijakan, sehingga penelitian tidak hanya mengkaji pesan pemerintah, tetapi juga respons kelompok terdampak secara langsung. Dengan demikian, studi ini membuka ruang lebih luas untuk memahami bagaimana komunikasi publik dapat mendukung dakwah pembangunan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Meidy. "Ethos, Pathos, Logos Dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (November 14, 2022): 442–69. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2066>.
- Bangun, Eric Persadanta, Ferry V I A Koagouw, and J S Kalangi. "Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline. Com." *Acta Diurna Komunikasi* 1, no. 3 (2019).
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Edited by Tjun Surjaman. 29th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fahrudin, Atef, Diding Bajuri, and Syamsul Arif Billah. "Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Kanal Youtube Official INews." *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 5, no. 2 (2022): 200–215.
- Gill, Harjinder, Kathleen Boies, Joan E Finegan, and Jeffrey McNally. "Antecedents of Trust: Establishing a Boundary Condition for the Relation between Propensity to Trust and Intention to Trust." *Journal of Business and Psychology* 19, no. 3 (2005): 287–302.
- Hart, Roderick P, Suzanne M Daughton, and Rebecca LaVally. *Modern Rhetorical Criticism*. Routledge, 2017.
- Isa, Adam. "Retorika Prabowo Subianto Dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024." *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 16, no. 2 (September 5, 2024): 143–67. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.5492>.
- Kennedy, George A. "On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse," 1991.
- Khalis, Nur, Icha Rastika. "Petani Jadi Penyumbang Angka Kemiskinan." *Kompas.com*. Accessed November 23, 2025. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/13/145512778/petani-jadi-penyumbang-angka-kemiskinan-di-sumenep>.
- McCroskey, James C. *An Introduction to Rhetorical Communication*. Routledge, 2015.
- Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. 2012." Bandung, 2018.
- Repetisi. "Pernyataan Bupati Sumenep Soal Petani Penyumbang Angka Kemiskinan Picu Gelombang Kritik Di Media Sosial." Repetisi Merekam Peristiwa, Menyuarakan Kebeneran. Accessed November 23, 2025. <https://www.repetisi.net/2025/09/pernyataan-bupati-sumenep-soal-petani-penyumbang-angka-kemiskinan.html>.
- Seba, Tri Putra Kurnia, Melsje Yellie Memah, and Noortje Marsellanie Benu. "Ketimpangan Sosial Pada Sumberdaya Pertanian Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)* 6, no. 4 (2024): 251–58.
- Sucipta, Johantan Alfando Wikandana. "Retorika Politik Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor Dalam Menghadapi Media Massa." *Literasi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2023).
- Sugiono, Herman, and Ilmiyatur Rosida. "Analisis Retorika Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pada Sidang Tahunan MPR/DPRD 16 Agustus 2023: Penekanan Pada Pendidikan." *Journal in Teaching and Education Area*

1, no. 3 (2024): 328–40.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Triwicaksono, Yohanes De Britto Bimo, and Adi Nugroho. “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 133–45.

Widodo, Arif, Febriany, Irfaturahmah. “Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah.” *SELASAR KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33507/selasar.v1i1.312>.